

**GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA  
(Relasi Pemerintah Kalurahan Dengan Pokdarwis)**



**OLEH**

**NAMA : Vebriani Lidia Peni Geken**

**NIM : 19520044**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA**

**2023**



**GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA  
(Relasi Pemerintah Kalurahan Dengan Pokdarwis)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)  
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
JENJANG PROGRAM STUDI STRATA 1  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dipertahankan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta Pada



Hari : Jumat

Tanggal : 24 November 2023

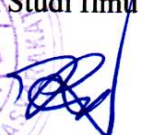
Jam : 11.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta


### TIM PENGUJI

NAMA	TANDATANGAN
<b><u>Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si</u></b> Ketua/Pembimbing	 .....
<b><u>Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si</u></b> Penguji I	 .....
<b><u>Dr. Rijel Samaloisa</u></b> Penguji II	.....

Mengetahui  
Ketua Prgram Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Rijel Samaloisa



## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Vebriani Lidia Peni Geken

Nim : 19520044

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **“Governance Dalam Pengembangan Destinasi Wisata (Relasi Pemerintah Kalurahan Dengan Pokdarwis)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan seluruh sumber yang telah dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Yogyakarta, 29 Desember 2023



Vebriani Lidia Peni Geken

## **MOTTO**

“Kunci untuk mewujudkan impian bukanlah dengan fokus pada kesuksesan tapi pada arti. Bahkan langkah kecil dan kemenangan kecil sepanjang perjalananmu bisa memberikan arti yang lebih hebat.”

“Silahkan kejar apa yang ingin kamu kejar. Tapi ingat, jangan sampai kehilangan apa yang seharusnya kamu jaga”.

“Tidak ada orang suci tanpa masa lalu, tidak ada orang berdosa tanpa masa depan”

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, dan kasihnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang hebat dalam semua kehidupan saya yakni:

1. Untuk Bapa Di Surga, Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosep dan suku lango Lewotinah yang selalu menjaga dan melindungi saya hingga pada detik ini.
2. Untuk Bapak Yohanes Boli dan Mama Magdalena Prada yang selalu setia mendokan Ian, serta selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Ian. Terima kasih banyak, semoga Tuhan selalu memberkati dan melindungi bapa dan mama selalu.
3. Untuk Ade Febrianus Bala Geken, Maria Claudya Lipat Geken, Agustian Aldino Kopong Geken, yang selalu mendukung Ian. Terima kasih Odi, Dia, dan Ino. Semoga ade bertiga selalu bahagia, juga dapat menggapai mimpi dengan baik.
4. Untuk Nene Kopong, Nene Lipat, Kaka Vita Geken, Ipar Gusti Adeloni, yang juga selalu mendukung saya. Semoga Tuhan selalu menjaga kita semua.
5. Untuk Teman baik saya Januarius Bonefasius Sina Kleden, yang selalu menjadi tempat saya untuk berkeluh kesah, membantu saya, memahami saya, dan mendukung saya. Terima kasih Abang, semoga Abang selalu bahagia, juga dapat menggapai mimpi Abang dengan baik.
6. Untuk semua keluarga besar Suku Geken dan juga keluarga dari mama, yang senantiasa mendukung saya.
7. Untuk Almamaterku STPMD “APMD” Yogyakarta
8. Untuk dosen pembimbingku Bapak Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si. Terima kasih karena bapak selalu baik, sabar dan penuh ketulusan dalam membimbing dan mendukung saya dalam berbagai bentuk. Semoga Tuhan selalu membalas kebaikan bapak dan bapak selalu di berkati.

9. Untuk Kaka Merlin, Abang Chester, Tansen Gomak, Oa Lilis, Ade Ellycy, Kaka Natalia, Andris, Evhy Bawel, Angela Liwun, Meta Maharya, Karni Lamapaha, Karlin Lewokerore, Ade Lani, Ade Cia, Ella Asamin, Lisa. Terima kasih banyak, atas semua bantuan, motifasi, dan kebersamaan kita selama ini. Tuhan membimbing kita selalu.
10. Untuk Nene Mia, Carles, Bolsen dan Anhar, terima kasih sareke, atas semua semangat, kebahagiaan dan dukungan yang tidak pernah pudar dari kalian semua. Semoga Tuhan selalu menjaga hubungan kekeluargaan diantara kita. Sukses untuk kita semua.
11. Untuk semua kaka arik, terkhususnya Keluarga Mahasiswa Adonara Yogyakarta (KMAY) yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak untuk semua pembelajaran yang sangat luar biasa. Semoga Tuhan selalu menuntun kehidupan kita semua.
12. Serta untuk semua orang yang selalu kebersamai saya selama ini, terima kasih banyak. Yesus menyertai kita selalu.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala berkat dan rahmatnya sehingga menyusun skripsi dengan Judul **“Governance Dalam Pengembangan Destinasi Wisata (Relasi Pemerintah Kalurahan Dengan Insitusi Lokal)”** dapat terselesaikan oleh penulis dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara langsung, maupun tidak langsung, yang telah membantu dalam terselesaikannya skripsi ini. Sehingga pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat bagi penulis dalam menimba ilmu dan pengetahuan akademik.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si selaku dosen pembimbing dan juga dosen akademik yang telah memberikan dukungan, sumbangan pemikiran, pengetahuan dan gagasan serta kerelaan yang baik dalam membantu untuk terselesainya skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan dan keluarga besar STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dan berguna selama menempuh Pendidikan di tempat ini.
6. Pemerintah Kalurahan Triharjo, bersama Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan seluruh masyarakat Kalurahan Triharjo yang telah memberikan izin penelitian dan dapat bekerja sama dalam penelitian ini, serta memberikan dukungan kepada penulis.



7. Seluruh pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas dukungan, masukan dan ide-ide yang sangat luar biasa dan saran yang membangun bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga kritik serta saran yang membangun dari semua pihak sangat dibutuhkan dalam memberikan pengetahuan lebih kepada penulis. Semoga Tuhan selalu menyertai dan membimbing kita semua.

Yogyakarta, Oktober 2023

Penulis,

Vebriani Lidia Peni Geken

## INTISARI

Kalurahan Triharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul menyusun agenda perubahan agar menjadikan Kalurahan yang maju, kuat dan mandiri. Hal itu ditunjuk dari Pemerintahan Kalurahan Triharjo kembali membangun dan mengembangkan perairan peninggalan belanda yang dijadikan tempat wisata. Perairan ini juga bukan semata-mata untuk dijadikan tempat wisata namun perairan ini juga sangat berfungsi untuk irigasi atau untuk mengairi lahan pertanian. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Relasi Pemerintah Kalurahan dengan Institusi Lokal dalam Pengembangan Destinasi Wisata di Kalurahan Triharjo Pandak Bantul.”

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian eksplanatif kualitatif, penelitian dengan metode eksplanatif yaitu penelitian yang memberikan penjelasan mengapa sesuatu terjadi atau menjawab pertanyaan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber informan yang terdiri dari: Lurah Kalurahan Triharjo; Carik Kalurahan Triharjo; Pokdarwis Kalaruhan Triharjo Ketua BPKal Triharjo; dan masyarakat. Dalam teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive. Dimana informan ini dapat di percaya untuk memberikan data yang obyektif terkait relasi pemerintah desa dan institusi lokal di Kalurahan Triharjo dalam pengembangan destinasi wisata dengan teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil pengembangan destinasi wisata Taman Ngancar sejauh ini sudah mengalami kemajuan dengan adanya beberapa fasilitas yang sudah tersedia seperti sarana prasarana umum diantaranya ada toilet umum, gazebo, rumah joglo, linmas, dapur umum, dan masih terus diupayakan sesuai kebutuhan yang berkembang. berkaitan dengan relasi pemerintah Kalurahan dan Pokdarwis dalam pengembangan desa wisata cukup kolaboratif hal ini sesuai dengan prinsip *Governance*, namun demikian juga terlihat pada kekuatan eksternal Kalurahan sebagai penyokong di tingkat kabupaten, pemerintah pusat, bahkan pihak swasta. Dan pemerintah Kalurahan Triharjo berperan penting dalam keterlibatannya saat proses pengembangan Destinasi Wisata Taman Ngancar.

Kata Kunci: *Governance*, Relasi, Pemerintah Kalurahan, Destinasi Wisata

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>INTISARI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Fokus Penelitian .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Manfaat Penelitian .....	12
1. Manfaat Akademis .....	12
2. Manfaat Praktis .....	12
F. Literatur Review .....	13
G. Kerangka Konseptual .....	16
1. Governance .....	16
2. Pengembangan Pariwisata .....	23
3. Institusi Lokal Masyarakat .....	33
4. Pemerintah Desa .....	36
H. Metode Penelitian .....	40
1. Jenis Penelitian .....	40
2. Objek Penelitian .....	41
3. Subyek Penelitian .....	42

4. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	42
5. Teknik Pengumpulan Data .....	43
6. Teknik Analisis Data .....	44
<b>BAB II DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Keadaan Geografis .....	46
1. Sejarah Kalurahan .....	46
2. Kondisi Geografis .....	47
3. Batas wilayah .....	47
B. Keadaan Demografi .....	48
1. Jumlah Penduduk .....	48
C. Kondisi Sosial dan Ekonomi .....	49
1. Sumber Utama Penghasilan Penduduk .....	50
2. Tenaga Kerja Berdasarkan Latar Pendidikan .....	50
D. Sarana dan Prasarana .....	51
1. Prasarana Umum .....	52
2. Prasarana Pendidikan .....	53
3. Prasarana Kesehatan .....	53
4. Usaha Ekonomi Produktif/ Industri Rumah Tangga .....	53
5. Jaringan Listrik .....	54
6. Ketersediaan Air Bersih .....	54
7. Sanitasi .....	55
8. Persampahan .....	55
E. Kondisi Pemerintahan Kelurahan .....	55
1. Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan .....	55
2. Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan .....	57
3. Visi dan Misi Kalurahan Triharjo .....	58
4. Organisasi Pokdarwis Kalurahan Triharjo .....	59
<b>BAB III GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESTINASI</b>	
<b>WISATA (RELASI PEMERINTAH KALURAHAN DENGAN</b>	
<b>(POKDARWIS) DI KALURAHAN “TRIHARJO” .....</b>	<b>60</b>
A. Deskripsi informan .....	60

B. Pengembangan Destinasi Wisata Taman Ngancar oleh Pemerintah Kalurahan dengan Pokdarwis Masyarakat di Kalurahan Triharjo .....	63
C. Relasi Pemerintah Kalurahan dengan Pokdarwis dalam Pengembangan Destinasi Wisata di Kalurahan Triharjo .....	68
D. Keterlibatan Pemerintah Kalurahan Saat Proses Pengembangan Destinasi Wisata .....	74
<b>BAB IV81 PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>86</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Deskripsi Informan Berdasarkan Umur atau Usia .....	10
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk 2022-2023 .....	48
Tabel 2.2 Organisasi Kamasyarakatan Kalurahan .....	57
Tabel 2.3 Struktur Pengurus Pokdarwis .....	59
Tabel 3.1 Deskripsi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	61
Tabel 3.2 Deskripsi Informan berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	61
Tabel 3.3 Deskripsi Informan Berdasarkan Pekerjaan.....	62

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Peta Desa Triharjo .....	47
Gambar 2.2 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Triharjo	57

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam paradigma pengembangan destinasi wisata, terdapat tiga komponen penting yang mempengaruhi keberlanjutan dari pembangunan destinasi wisata, yaitu budaya, lingkungan, dan ekonomi. Ketiga komponen pokok ini saling berhubungan dan menciptakan destinasi wisata yang berkualitas sehingga nantinya akan tercapai tujuan *Sustainable Tourism Development*. Untuk tercapainya tujuan destinasi wisata berkualitas, tentunya destinasi wisata tersebut harus dikelola secara profesional dan memiliki keunggulan yang menjadi daya tarik bagi wisatawan dalam bersaing dengan destinasi wisata lainnya di seluruh dunia. Adapun bentuk daya saing tersebut terlihat dari keunggulan daya tarik wisata, sosial budaya, dan alam lingkungannya. Selain itu dibutuhkan hubungan dan kerjasama yang sinergis antara pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta dalam proses pengembangan desa wisata yang disebut dengan *community based tourism*, dengan begitu akan tercapai tujuan pembangunan destinasi wisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

Berbagai lokasi wisata dengan beragam budaya yang melekat dapat ditemukan di berbagai daerah yang dapat menarik perhatian para pengunjung, baik wisatawan lokal maupun asing. Hal inilah yang menjadi kekuatan bagi pengembangan pariwisata. Perkembangan pariwisata saat ini menjadi fenomena global dengan melibatkan jutaan manusia yang bergerak dikalangan industri



pariwisata. Pariwisata dianggap mempunyai keunggulan karena mayoritas berada di sektor jasa, selain itu pariwisata merupakan komoditas yang paling berkelanjutan dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pengembangan daya tarik wisata seperti Desa Wisata seperti perkembangan sebuah jamur yang melanda Indonesia saat ini. Indonesia mengembangkan produk pariwisata budaya dengan menonjolkan sisi Desa Wisata sebagai salah satu daya tarik wisata unggulan dimana dua komponen yaitu budaya dan masyarakat menjadi titik utama dalam pengembangan Desa Wisata. Kebijakan pemerintah di dalam melakukan promosi pariwisata, pelayanan publik, pengembangan kawasan pariwisata, membentuk produk-produk wisata yang inovatif, dan meningkatkan sumber daya manusia, serta melakukan kampanye sadar wisata telah dilakukan untuk dapat memajukan pariwisata. Kebijakan di dalam pengembangan desa sebagai destinasi wisata adalah menetapkan desa-desa yang memiliki potensi pariwisata untuk menjadi Desa Wisata, kewenangan ini didelegasikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan desa-desa yang memiliki potensi budaya untuk menjadi daya tarik wisata dengan regulasi hukum berupa produk hukum yaitu Peraturan Daerah tentang pemilihan desa-desa yang menjadi Desa Wisata.

Berbagai dampak yang dapat dihasilkan oleh sektor pariwisata dapat menstimulasi perkembangan ekonomi di wilayah-wilayah tertentu. Meningkatnya jumlah wisatawan yang datang di berbagai wilayah di Indonesia akan menstimulus daerah tersebut untuk memberikan fasilitas yang ditawarkan untuk para wisatawan. Beberapa contoh sektor pariwisata mempengaruhi sektor

lainnya seperti tour and travel yang meliputi hotel dan restoran dan pemandu wisata (Wardhana, Kharisma, & Stevani, 2019:34). Upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah, termasuk pemerintah kalurahan. Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kalurahan hadir untuk mengatur, mengelola, dan merawat sumber daya alam. Hal ini bertujuan untuk mendistribusikan sumber daya kepada rakyat secara adil dan merata. Undang-Undang Desa menetapkan empat kewenangan kepada kalurahan yaitu menyelenggarakan pemerintahan, membangun, memberdayakan dan membina masyarakat kalurahan. Hal ini memberi makna bahwa pemerintah kalurahan berhak untuk mengatur dan mengurus bagian dari hak dan kewenangan kalurahan dan kewenangan lokal berskala kalurahan termasuk mengolah potensi kalurahan seperti pemanfaatan alam menjadi destinasi wisata. Jadi, kehadiran pemerintah kalurahan dalam pengolahan potensi alam kalurahan merupakan wujud dari upaya memberdayakan masyarakat dalam hal ini peningkatan ekonomi masyarakat.

Sementara itu dalam pandangan ekonomi nasional ekowisata dapat memainkan peran sentral dalam konservasi dan pembangunan pedesaan. Pendapatan devisa dari pariwisata memiliki peranan yang cukup penting dalam struktur penerimaan devisa nasional, terutama bila dibandingkan dengan devisa yang berasal dari kegiatan ekspor barang (Afdi, 2011:23). Sumbangan langsung sektor pariwisata terhadap PDB mencapai lebih dari 3,8% pada 2018 atau mencapai hingga 9% dari PDB jika mempertimbangkan multiplier effect dari PDB (Sujai, 2016:46). Pada tahun 2017, sektor pariwisata menyumbang 4,50%

dari total PDB Indonesia dan naik menjadi 4,80% pada tahun 2018. Hal ini menandakan bahwa sektor pariwisata mempunyai peluang untuk membantu menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada saat sektor ekspor dan impor sedang dalam kondisi yang tidak stabil.

Jika mengikuti logika Governance, maka dapat dipahami bahwa pemerintah kalurahan adalah aktor sekaligus institusi yang berwenang dan mempunyai hak untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Sementara itu, mengatur dan mengurus mempunyai beberapa makna, yaitu: *Pertama*, mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat pihak-pihak yang berkepentingan. *Kedua*, bertanggung jawab merencanakan, menganggarkan, dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan serta menyelesaikan masalah yang muncul. *Ketiga*, memutuskan dan menjalankan alokasi sumber daya (baik dana, peralatan, maupun personil) dalam kegiatan pembangunan atau pelayanan, termasuk membagi sumber daya kepada penerima manfaat. *Keempat*, mengurus berarti menjalankan, melaksanakan, maupun merawat pelayanan publik (*public goods*) yang telah diatur tersebut (Sutoro Eko, 2015:101).

Memaknai wisata, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu tempat tujuan wisata yang sangat menarik di Jawa Tengah, daerah tersebut memiliki potensi wisata yang besar dan mempunyai ciri khas tersendiri, diantaranya adalah wisata alam, wisata budaya, wisata belanja, wisata religi dan wisata olah raga, dan semuanya juga mempunyai atraksi wisata yang berbeda.

Salah satu obyek wisata yang menjadi andalan dan harapan positif dalam suksesnya kepariwisataan di Kota Yogyakarta yaitu obyek wisata Malioboro. Obyek tersebut merupakan sasaran perencanaan pembangunan sebagai potensi wisata yang memadai, dan layak untuk dikembangkan dengan perencanaan yang matang.

Seperti halnya di Kabupaten Bantul yang mempunyai banyak tempat wisata yang dapat menarik wisatawan domestik, namun masih kurang dalam dukungan pemerintah daerah itu terlihat dari masih minimnya wisatawan mancanegara dan fasilitas di objek wisata yang belum terpenuhi dengan baik. Kabupaten Bantul adalah daerah dengan objek wisata yang sangat banyak, tidak hanya pantai nya saja namun juga ada wisata budaya. Potensi wisata pantai di Kabupaten Bantul dapat menjadikan sumber pendapatan daerah yang menjadi faktor utama dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten Bantul. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mencatat, pada tahun 2022 kunjungan wisata ke Bantul mencapai 4,2 juta wisatawan, Jika dibandingkan pada tahun 2021 yang hanya mencapai 1,4 juta wisatawan.

(<https://jogja.tribunnews.com/2022/03/19/pendapatan-dari-sektor-pariwisata-di-bantultembus-rp-6-miliar-dalam-waktu-25-bulan.di>.)

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan pemerintah desa sebagai institusi sekaligus aktor yang menentukan kualitas penyelenggaraan pembangunan desa, termasuk praktik tata kelola pemerintahan desa. Desa kemudian ditantang untuk mengenali potensi masing-masing dan mengelolanya demi kesejahteraan sendiri. Namun,

tanpa perencanaan dan pengelolaan yang baik, penggunaan dana desa dapat melenceng dari tujuan awalnya. Sejalan dengan hal tersebut, potensi sumber daya alam (SDM) di desa juga harus dikelola secara berkelanjutan dan memberi manfaat yang besar bagi masyarakat.

Lebih lanjut untuk mempermudah pemerintah desa dalam pengembangan wisata maka diperlukan partisipasi aktif dari pada institusi lokal yang ada di desa. Timbulnya institusi lokal tidak terlepas dari adanya proses sosial dari masyarakat menurut (Soleman, 2001). Proses sosial terjadi karena adanya interaksi sosial yang menimbulkan kontak sosial secara timbal balik dan mendapatkan respon individu atau kelompok. Kontak sosial pada dasarnya merupakan aksi individu atau kelompok dan mempunyai makna bagi pelakunya, yang kemudian ditangkap oleh kelompok atau individu lainnya. Adapun komunikasi muncul setelah kontak berlangsung dan kemudian terjadi bentuk interaksi. Sedangkan menurut (Cheema, 2005) ada yang diprakarsa atau disponsori oleh pemerintah dengan tujuan yang sudah dirumuskan secara jelas dan ada pula intitusi atau organisasi yang murni inisiatif masyarakat dengan tujuan yang biasanya bersifat dinamis dan tidak tersusun secara jelas, tapi lebih bersifat evolutif sesuai dengan perkembangan intitusi yang bersangkutan.

Sementara itu dalam pengembangan destinasi wisata ini relasi antara pemerintah desa dan para intitusi lokal sangat dibutuhkan. Selain hal tersebut, diperlukan pula tata kelola yang baik dan memerlukan prinsip-prinsip, sebagai berikut: *Pertama*, kooperatif, yakni mampu melakukan kerja sama dan bekerja sama dalam keberlangsungan hidup maupun untuk mengembangkan usaha

yang dimiliki. *Kedua*, partisipatif, yakni dukungan dan kontribusi penuh dari semua pihak yang terlibat didalamnya. *Ketiga*, emansipatif, yakni perlakuan sama tanpa ada bias baik dari segi agama, golongan, ataupun suku untuk seluruh *stakeholders* yang terlibat. *Keempat*, transparan, yakni masyarakat umum dapat dengan mudah mengakses berbagai pengetahuan mengenai aktifitas yang dilakukan terutama yang memiliki pengaruh pada kepentingan umum. *Kelima*, akuntabel, yakni pertanggungjawaban dari seluruh aktifitas dan kegiatan unit usahanya. *Keenam*, sustainabl, yakni destinasi wisata harus menjadi wadah bagi pengembangan maupun pelestarian berbagai kegiatan unit usaha (Suharyanto et al., 2014).

Relasi yang dibangun antara pemerintah desa dan institusi lokal ini sejalan dengan salah satu dari lima perspektif ilmu pemerintahan. Dimana relasi dalam pengembangan adalah bentuk dari *governance*. Sedarmayanti (2003) berpendapat istilah *Governance* ini tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan dan, pembinaa penyelenggaraan.

Lebih lanjut Sedarmayanti (2003) mengelompokkan unsur-unsur pemerintahan (*Governance Stakeholders*) ke dalam tiga kategori, yaitu: 1) Negara/Pemerintahan; konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat (*Civil Society Organization*); 2) Sektor Swasta; pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan (*manufacturing*), perdagangan,

perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal; 3) Masyarakat (*Civil Society*); kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

Peranan pemerintah desa dalam melaksanakan *good governance* adalah pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik meliputi antara lain: (1) akuntabilitas (*accountability*) yang artinya sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya; (2) keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*) dalam arti masyarakat tidak hanya dapat mengakses suatu kebijakan tetapi juga ikut berperan dalam proses perumusannya; (3) partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan. Dalam *good governance* tidak lagi hanya pemerintah yang berperan tetapi masyarakat juga berperan dalam governance. Sehingga kemitraan dan relasi merupakan manajemen strategis yang dilakukan oleh pemerintah desa dan institusi lokal agar pembangunan dan pengelolaan desa wisata dapat berjalan efektif.

Pada saat ini di Kalurahan Triharjo Pandak Bantul menyusun agenda perubahan agar menjadikan Kalurahan yang maju, kuat dan mandiri. Hal itu tampak dari Pemerintahan Kalurahan Triharjo kembali membangun dan

mengembangkan perairan peninggalan belanda yang dijadikan tempat wisata. Dimana perairan ini juga bukan semata-mata untuk dijadikan tempat wisata namun perairan ini juga sangat berfungsi untuk irigasi atau untuk mengairi lahan pertanian. Di Kalurahan Triharjo Pokdarwis sebagai pelaku pengembangan destinasi wisata perairan peninggalan Belanda, pokdarwis berperan aktif dalam Kewenangan penyelenggaran pemerintah dari pembuatan regulasi Desa/Kalurahan (Perdes) tentang destinasi yang akan dikembangkan. Kewenangan pelaksanaan pembangunan dari sarana pembangunan sarana prasarana seperti pengembangan arsitektur bangunan, tempat parkir, toilet umum, infrastruktur jalan, penginapan, kewenangan pembinaan kemasyarakatan dari pengadaan pelatihan, bimtek tentang pengembangan destinasi wisata, serta kewenangan pemberdayaan masyarakat bisa dari pengembangan UMKM masyarakat sebagai pelaku pengembangan destinasi pariwisata. Di Kalurahan Triharjo pemerintah Kalurahan dan Pokdarwis sebagai pilar penting dalam pengembangan destinasi wisata.

Sementara itu maksud dari pembentukan pokdarwis yaitu merupakan wujud untuk pengembangan kelompok masyarakat agar berperan sebagai motivator, penggerak, serta komunikator dalam upaya meningkatkan kepedulian dan kesiapan masyarakat masyarakat di sekitar destinasi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata agar berperan sebagai rumah yang baik bagi berkembangnya kepariwisataan, serta memiliki kesadaran akan peluang dan nilai manfaat yang dapat dikembangkan dari kegiatan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Adapun tabel gambaran deskripsi informan sebagai berikut:



**Tabel 1. 1**

**Deskripsi Informan berdasarkan Umur atau Usia**

<b>No</b>	<b>Umur Usia (Tahun)</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
1.	20-30	2	22,22
2.	31-40	4	44,44
3.	41-50	2	22,22
4.	50 Tahun ke atas	1	11,11
	Jumlah	9	100

(Sumber: Data Informan 2023)

Dalam pandangan *Governance* pembangunan destinasi wisata harus didukung oleh semua lapisan dan kalangan masyarakat, serta fokus pemberdayaan masyarakat. termasuk dalam hal ini, menjaga komitmen bersama pada seluruh stakeholders yang terkait dalam pembangunan wisata, agar dapat berperan penuh secara tanggungjawab sekaligus sebagai elemen pendukung peningkatan kinerja antar organisasi baik pemerintah Desa/Kalurahan maupun organisasi lokal masyarakat untuk ikut menggerakkan kemampuan kordinasi dari masing-masing stakeholders adalahh pola relasi yang dibangun pemerintah terhadap institusi lokal masyarakat terhadap pengembangan destinasi wisata.

Oleh karenanya dengan adanya pengembangan wisata ini masyarakat setempat juga dapat mencari kebutuhan perekonomian mereka, diamana masyarakat dengan inisiatif membuka warung jualan. Dengan adanya wisata yang dikembangkan ini masyarakat juga sangat mendukung karena mereka berpikir bahwa pemerintah pengembangkan suatau hal bukan saja untuk kepentingan mereka namun juga melihat dengan keadaan masyarakat yang sekarang ini. Sehingga kapasitas pemerintah dalam pengembangan pariwisata ini juga dapat memakmurkan warga di Kalurahan Triharjo.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana relasi pemerintah kalurahan dengan Pokdarwis dalam pengembangan destinasi wisata di Kalurahan Triharjo Pandak Bantul.

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai obyek penelitian yang diangkat. Manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian terlebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan yang tidak relevan. Fokus penelitian ini meliputi:

1. Pengembangan Destinasi Wisata Taman Ngancar oleh Pemerintah Kalurahan dengan Pokdarwis sebagai institusi lokal masyarakat di Kalurahan Triharjo.
2. Relasi Pemerintah Kalurahan dengan Pokdarwis sebagai institusi lokal masyarakat dalam Pengembangan Destinasi Wisata di Kalurahan Triharjo Pandak Bantul.
3. Keterlibatan pemerintah kelurahan saat proses pengembangan destinasi wisata.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka peneliti akan merumuskan tujuan yang akan dicapai dari setiap permasalahan yang akan disusun. Oleh karena itu tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan relasi Pemerintah Kalurahan dan Pokdarwis dalam pengembangan destinasi wisata di Kalurahan Triharjo.
2. Untuk mengetahui pengaruh relasi Pemerintah Kalurahan dan Pokdarwis di Kalurahan Triharjo.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Akademis**

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi-studi mengenai relasi pemerintah kalurahan dengan institusi lokal dalam pengembangan destinasi wisata di Kalurahan Triharjo Pandak Bantul. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini sebagai informasi, masukan dan referensi kepada Pemerintah Kalurahan Triharjo terhadap Relasi Pemerintah Kalurahan dan Institusi lokal dalam pengembangan destinasi wisata. Serta adanya penelitian ini bisa bermanfaat bagi peneliti, dalam menambah pengetahuan tentang relasi Pemerintah Kalurahan dan Institusi Lokal dalam Pengembangan Destinasi Wisata.

## F. Literatur Review

Pada dasarnya, penelitian tentang relasi Pemerintah Desa/Kalurahan dan Institusi lokal dalam pengembangan destinasi wisata bukanlah sesuatu yang baru. Peneliti-peneliti terdahulu berupaya mengungkap relasi pemerintah Desa/Kalurahan dan Institusi Lokal di berbagai daerah. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang berupaya mengungkap tentang relasi pemerintah dan institusi lokal adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Parasia (2017) yang berjudul “*Pengembangan Pariwisata Dan Keterlibatan Masyarakat Di Desa Wisata Jatiluwih*” hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan daya tarik wisata di Desa Jatiluwih secara langsung menyerap tenaga kerja dari masyarakat lokal, melestarikan lingkungannya dan juga memberdayakan masyarakat lokal untuk ikut serta dalam pengelolaan Desa Wisata di Jatiluwih. Namun begitu, ditemukan juga terjadi komodifikasi pada bangunan tradisional *saka roras* dan terjadinya konflik kepentingan.

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Armela Shintani (2020) yang berjudul “*Relasi Pemerintah Daerah Dan Swasta Dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Di Kelurahan Sei Gohong*” hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam governance relasi dapat dilihat dari adanya interaksi antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Dalam pengelolaan destinasi wisata di Sei Gohong interaksi ketiga stakeholder ini dapat dilihat dari pemerintah sebagai fasilitator, swasta sebagai penyedia dan penyelenggara jasa dan masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan wisata. Pemerintah sebagai fasilitator pada

wisata Sei Gohong membangun fasilitas yang dibutuhkan guna mendukung kegiatan wisata. Swasta dalam penyedia dan penyelenggara jasa menyediakan fasilitas menginap yaitu villa guna menyediakan jasa yang sifatnya belum dipenuhi oleh pemerintah daerah. Sedangkan masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan destinasi wisata dengan membentuk kelompok sadar wisata sebagai bentuk dari kepedulian akan adanya potensi pariwisata di daerahnya serta pengelolaan tempat wisata Sei Gohong dikelola langsung oleh kelompok sadar wisata.

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Nuryah Asri Sjafirah, Dian Wardiana Sjuchro, dan Heru Ryanto Budiana (2020) yang berjudul “*Sinergi Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Suntenjaya Sebagai Community Based Tourism*” hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi merupakan kata kunci untuk mewujudkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan *Community Based Tourism*. pelaksanaannya konsep *Community Based Tourism* ini tergantung pada kemampuan pemimpin masyarakat dalam hal ini pemerintah setempat untuk merangkul masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam konteks pembangunan desa wisata yang berkelanjutan.

*Keempat*, Penelitian yang dilakukan oleh Agista Ul Hakim Paxi Permadi dan Emy Kholifah R (2021) yang berjudul “*Sinergisitas Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Desa Wisata*” hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergisitas pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengembangan desa wisata di wisata adat suku Osing Kemiren, Kecamatan

Glagah Kabupaten Banyuwangi secara nyata terlaksana di Desa Kemiren, dimana Pemerintah Pusat yakni Kementerian Pariwisata dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dinas Pariwisata dan pemerintah desa memiliki cara tersendiri dengan tujuan yang sama untuk membina dan memberdayakan masyarakat serta merangkul seluruh kalangan masyarakat untuk ikut secara langsung dan bersinergi dengan kepala adat, karang taruna, pokdarwis, Bumdes, dan stakeholder dalam mengembangkan desa wisata Kemiren sehingga terbentuknya paket wisata yang menambah atmosfer wisatawan di Kemiren dan hasil sinergisitas ini terbukti dengan jumlah wisatawan yang hadir di desa kemiren bertambah setiap tahunnya.

Secara umum, keempat penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Kesamaannya terletak pada topik penelitian dimana baik penelitian terdahulu maupun penelitian ini berupaya mengungkap relasi pemerintah Desa/Kalurahan dan masyarakat Desa/Kalurahan dalam pengembangan destinasi wisata. Namun, keempat penelitian di atas tetap memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian ini secara khusus membahas dan menjelaskan upaya relasi pemerintah Kalurahan dan Institusi lokal masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata.

Hal lain yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah teori yang digunakan. Penelitian ini menggunakan *Governance*. Dengan memakai teori *Governance*, penelitian ini hendak mengungkap pola relasi pemerintah kalurahan dan intsitusi lokal masyarakat. kualitas interaksi yang terjadi antara komponen *Governance* yaitu pemerintah, masyarakat sipil.

## G. Kerangka Konseptual

### 1. Governance

Dalam melihat relasi pemerintah Kalurahan dan Pokdarwis penelitian ini menggunakan teori *Governance*. Pembahasan mengenai *Governance* sudah mengalami perkembangan yang panjang, pendapat dari Peter dan Piere (1998:223-224) mengemukakan bahwa *governance* memiliki empat elemen dasar, yaitu:

- a. Dominasi jaringan (*the domination of network*), dalam sebuah kebijakan formal, pemerintah didominasi oleh orang-orang yang memiliki pengaruh, hal ini berkaitan dengan suatu barang dan jasa yang akan diproduksi.
- b. Kemampuan dari negara yang semakin menurun untuk melakukan kontrol langsung (*the state's declining capacity for direct control*). Walaupun kini pemerintah tidak lagi melakukan kontrol terpusat akan kebijakan publik, akan tetapi masih memiliki kekuatan untuk mempengaruhinya. Kini kekuatan negara dikaitkan dengan kemampuannya dalam bernegosiasi dan berunding dengan aktor yang ada dalam jaringan kebijakan semua anggota yang ada dalam jaringan ini diterima sebagai mitra dalam sebuah proses kebijakan.
- c. Menggabungkan sumber daya publik dan swasta (*the blending of public and private resources*). Para aktor publik dan swasta bekerjasama untuk memperoleh sumber daya yang tidak bisa didapatkan secara mandiri. Seperti, menggunakan suatu perusahaan swasta untuk

mengimplementasikan sebuah kebijakan memungkinkan pemerintah untuk menghindari beberapa masalah prosedural seta akuntabilitas yang mahal dan memakan waktu yang relatif lama. Perusahaan mampu melakukan negosiasi kepada pemerintah untuk membiayai proyek-proyek yang menguntungkan kepentingan publik akan tetapi tidak mungkin dibiayai oleh pihak swasta sendiri.

- d. Penggunaan beberapa instrumen (*use of multiple instrument*). Ini merupakan peningkatan keinginan untuk mengembangkan dan menggunakan metode non-tradisional dalam membuat dan menjalankan kebijakan publik. Hal ini juga digunakan melalui instrumen tidak langsung, misalnya menggunakan intensif pajak untuk mengubah sebuah perilaku.

Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah desa mempunyai tiga fungsi, yaitu: pengaturan (*public regulation*), pelayanan publik (*public goods*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Pengaturan merupakan kegiatan mengatur (membuat peraturan tentang perintah yang harus dijalankan dan larangan yang harus dihindari) tentang pemanfaatan barang-barang publik seperti pendidikan, kesehatan, jalan, laut, sungai, hutan, kebun, air, udara, uang, dan lain-lain. Sedangkan pemberdayaan adalah fungsi pemerintah memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan barang-barang publik serta mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat (Sutoro Eko, 2015:101-103).



Nuryati dan Hwang (2002) mengidentifikasi bahwa pemerintah merupakan aktor sentral dalam perkembangan suatu destinasi wisata. Akses yang kuat terhadap kekuasaan dan sebagai penentu kebijakan dalam usaha pengembangan suatu destinasi wisata menjadi modal utama sektor pemerintah berkontribusi dalam kegiatan wisata. Sektor swasta dengan keunggulannya dalam bidang penyediaan modal secara cepat, mengikuti perkembangan jaman dan memiliki tenaga-tenaga kerja yang professional menjadi sektor yang dapat menutupi kekurangan dari sektor pemerintah.

Sedarmayanti (2003) mengelompokkan unsur-unsur pemerintahan (*governance stakeholders*) ke dalam tiga kategori, yaitu: 1) Negara/Pemerintahan; konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat (*Civil Society Organization*); 2) Sektor Swasta; pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan (*manufacturing*), perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal; 3) Masyarakat (*Civil Society*); kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

Sementara Sumarto (2003) mengartikan *governance* sebagai mekanisme, praktik dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah- masalah publik. Kualitas *governance* dinilai dari kualitas interaksi yang terjadi antara komponen *governance* yaitu pemerintah, *civil society* dan sektor swasta. Sumarto menjelaskan dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor paling menentukan. Implikasinya peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain (sebagai fasilitator) untuk masyarakat dan sektor swasta. Masyarakat berpartisipasi dan swasta ikut aktif melakukan upaya dalam upaya penyelenggara dan penyedia jasa membantu pemerintah.

Sumarto (2003) juga mengidentifikasi dalam pengelolaan destinasi wisata tiga (3) aktor penting ini yaitu: 1) Pemerintah sebagai fasilitator dalam pengelolaan wisata; 2) Swasta sebagai penyedia dan penyelenggara jasa dan, 3) Masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan wisata.

Selanjutnya Spadley dan McCurdy dalam Astuti (2012) menyatakan relasi atau hubungan sosial yang terjalin antara individu berlangsung dalam waktu yang relatif lama akan membentuk suatu pola, sehingga pola hubungan ini disebut dengan pola relasi sosial. Pariwisata

adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Begitu juga dengan Bevir (dalam Zaenuri 2016) telah mengemukakan bahwa *governance* adalah perubahan sistem tata pemerintahan yang meliputi: 1) Pergantian dari sistem hirarki dan pasar menjadi sistem jaringan dan kemitraan; 2) Pelakukan interkoneksi antara administrasi negara dengan masyarakat sipil; 3) Pergantian sistem administrasi yang mengandalkan penekanan dan kontrol menjadi pengarahan dan koordiansi; 4) Pergantian aktivitas pemerintah dari pengaturan dan intruksi menjadi negosiasi dan diplomasi; 5) Penyertaan aktor non negara dalam proses kebijakandan pelayanan publik.

Dari wacana konseptual hingga praktis, konsep *Governance* ternyata masih dihadapkan dengan persoalan yang besar dan menjadi tantangan bagi para ahli administrasi publik, masalah yang muncul sehubungan dengan paradigma manajerial dan demokrasi Bevir (dalam Zaenuri 2016). Dari paradigma manajerial, organisasi dengan banyak aktor-aktor dalam jaringan masih kurang memperlihatkan komando yang jelas misalnya birokrasi yang bersifat hirarkis. Para pembuat kebijakan dan lain-lain telah berusaha untuk mendapatkan cara yang efektif bertindak dalam pengaturan baru. Keikutsertaan aktor non-negara dalam pembuatan kebijakan dan pelayanan menimbulkan pernyataan apakah hasilnya adalah untuk meningkatkan

kualitas demokrasi atau berpihak pada pemerintah atau swasta. Akuntabilitas telah menjadi perhatian oleh lembaga baru dan model partisipasi.

Walaupun masih menimbulkan masalah namun keberadaan teori *governance* kini semakin signifikan dalam pelaksanaan urusan publik. Keikutsertaan aktor non-negara dalam urusan publik dengan tanpa mengedepankan kesejahteraan masyarakat menjadi permasalahan tersendiri. Masalah model partisipasi yang sesuai agar tidak melemahkan kekuatan negara juga perlu penjelasan lebih mendalam lagi. Jaringan yang seharusnya dibangun untuk menghadirkan kerjasama diantara *stackholder* masih membutuhkan upaya yang berkelanjutan, demikian juga sebagai akhir dari kolaborasi diantara ketiga pilar *governance* dibutuhkan pola kemitraan yang berorientasi jangka panjang dan memperoleh hasil yang sama-sama menguntungkan.

Dwiyanto, (2005) menjelaskan bahwa sejalan dengan timbulnya pergeseran paradigma dari *Government* ke *Governance* merupakan cerminan dari *political will* pemerintah untuk menggerakkan reformasi *governance* melalui penerapan prinsip-prinsip *Governance* yang baik (*Good Governance*). Memandang bahwa teori *Good Governance* memiliki kerumitan yang tinggi dan kendala yang cukup besar maka dibutuhkan sebuah langkah strategis untuk memulai pembaharuan praktek *Governance*, pengembangan akan lebih mudah dilakukan jika dimulai dari sektor pelayanan publik termasuk di bidang pelayanan pariwisata.

Dalam penelitian ini, *Governance* berfokus pada kualitas interaksi (relasi) yang terjadi antara komponen *Governance* yaitu pemerintah, *civil society* (Institusi lokal masyarakat), pemerintah Kalurahan Triharjo hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor paling menentukan. Implikasinya peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain (sebagai fasilitator) untuk masyarakat (organisasi lokal masyarakat) dan dan pihak lain seperti sektor swasta. Masyarakat berpartisipasi dan swasta ikut aktif melakukan upaya dalam upaya penyelenggara dan penyedia jasa membantu pemerintah.

Dalam penelitian ini *Governance* digunakan untuk menganalisis relasi kuasa antara pemerintah Kalurahan terhadap Pokdarwis sebagai organisasi lokal masyarakat. Bahwa pengembangan destinasi pariwisata dalam perspektif *Governance*, urusan kewenangan tidak sepenuhnya menjadi urusan pemerintah Kalurahan Triharjo dilihat dalam empat poin berikut ini:

- a. Kewenangan penyelenggaraan pemerintah Desa/Kalurahan
- b. Kewenangan pelaksanaan pembangunan
- c. Kewenangan pembinaan kemasyarakatan
- d. Kewenangan pemberdayaan masyarakat

Bagaimana melihat relasi kuasa pemerintah Kalurahan Triharjo dan Pokdarwis sebagai organisasi lokal masyarakat. Dalam pengembangan

destinasi pariwisata relasi kuasa pemerintah dan pokdarwis perlu dilihat dari model, penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat.

## **2. Pengembangan Pariwisata**

Secara umum wisata dapat diartikan dengan perjalanan atau berpergian, sedangkan pariwisata memiliki tambahan kata yaitu “pari” yang berarti penuh, lengkap, berkeliling atau berkali-kali (Suwantoro, 2004). Menurut Wahab (2003) bahwa pariwisata merupakan suatu perpindahan sementara organisasi yang mempunyai pola hidup berbeda.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan disebutkan bahwa objek dan daya tarik wisata terdiri atas: 1) Objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora fauna; 2) Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia berupa museum, peninggalan sejarah, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualang alam, taman rekreasi dan tempat hiburan.

Sedangkan pengertian pengembangan pariwisata, Soegono dkk. (2008:679) menjelaskan bahwasannya kata pengembangan mengandung pengertian pembangunan secara bertahap dan teratur serta yang berfokus atau tertuju pada sasaran yang dikehendaki. Terkait dengan pembangunan pariwisata, Paturusi (2001) mendefinisikan bahwa pengembangan suatu pariwisata adalah Suatu strategi yang dilakukan untuk meningkatkan, memperbaiki dan memajukan kondisi dari objek wisata atau daya tarik

wisata yang dikunjungi oleh para wisatawan. Di samping itu dapat juga memberikan manfaat bagi orang-orang yang terlibat baik itu pemerintah daerah, masyarakat di sekitar tempat wisata atau organisasi pengelolaanya. Sebuah objek atau tempat tujuan wisata setidaknya harus memiliki empat komponen pengembangan, diantaranya adalah; daya tarik (*attraction*), akses yang mudah dijangkau (*access*), fasilitas penunjang (*amenities*), dan organisasi kepariwisataan (*ancillary service*).

Keempat komponen ini sangatlah penting dan berkaitan satu dengan yang lainnya dalam sebuah pengembangan wisata:

- a. *Attraction* (daya tarik), adalah sebuah objek yang didasarkan pada suatu keindahan, keunikan atau nilai yang dimiliki serta ciri khas tersendiri yang dimiliki oleh objek wisata tersebut yang dapat membuat wisatawan tertarik untuk mengunjunginya.
- b. *Access* (mudah dijangkau), faktor kemudahan yang disediakan untuk para wisatawan berupa tersedianya fasilitas-fasilitas transportasi penunjang perjalanan dan sistem komunikasi yang memadai.
- c. *Amenity* (fasilitas), tersedianya fasilitas pendukung atau akomodasi untuk para wisatawan berupa tempat makan, shovenir shop, café, tempat hiburan, hotel, bank atau ATM dan beberapa fasilitas lainnya yang dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para wisatawan.
- d. *Ancillary* (organisasi kepariwisataan), berperan sebagai salah satu lembaga yang membantu dalam proses perkembangan wisata baik itu

dalam segi penyediaan fasilitas penunjang pariwisata, pemberian pelatihan, bagian pemasaran dan promosi, pembuat kebijakan, dan juga pengendalian terhadap dampak lingkungan.

Robert Christie (2000), mengemukakan bahwa Dalam pengembangan pariwisata, sektor publik dan sektor swasta akan terlibat dan saling bekerjasama. Pengembangan tersebut hendaknya memperhatikan ruang lingkup budaya, sejarah dan ekonomi dari daerah tujuan wisata. Pariwisata perlu dikembangkan secara tepat, karena dapat memberikan dampak positif baik bagi wisatawan maupun komunitas tuan rumah. Pariwisata dapat menaikkan taraf hidup melalui keuntungan secara ekonomi dari wisatawan yang berkunjung.

Pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan mengembangkan infrastruktur serta menyediakan fasilitas rekreasi sehingga wisatawan dan penduduk setempat saling diuntungkan. Keberhasilan pengembangan pariwisata dibutuhkan perencanaan atau strategi yang fleksibel dan menyeluruh. Fleksibilitas dibutuhkan untuk penyesuaian dan perumusan strategi dalam menanggapi perubahan internal ataupun eksternal. Dalam pengembangan pariwisata dibutuhkan ketelitian karena berkaitan dengan ekonomi, lingkungan dan sosial budaya.

Sementara Laiper dalam Cooper et.al (2006:5), menjelaskan bahwa dalam sebuah konsep pariwisata terdapat tiga komponen utama yang menyebabkan terjadinya sebuah perjalanan wisata, diantaranya adalah:



a. Pengunjung Wisata

Ia adalah aktor dalam sebuah perjalanan wisata. Orang yang akan menikmati keindahan, keunikan serta ciri khas tersendiri yang ada dalam sebuah objek wisata.

b. Komponen Geografi

Pergerakan pengunjung wisata berlangsung pada area-area berikut:

1) Daerah Asal Pengunjung Wisata

Daerah tempat asal dari wisatawan atau rumah mereka, tempat dimana mereka beraktivitas, bekerja dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dari daerah asalnya, seseorang akan bisa menentukan dan mencari tempat wisata yang bagus dan unik untuk dikunjungi.

2) Daerah Transit

Tidak semua wisatawan harus berhenti di daerah transit ini, namun para wisatawan pasti akan melalui daerah transit ini jika mereka melakukan sebuah perjalanan wisata sehingga peran dari daerah transit ini juga penting.

3) Daerah Tujuan Wisata

Daerah yang menjadi tujuan akhir dari para wisatawan dimana di tempat inilah mereka akan menikmati hal-hal indah dan menarik yang sudah direncanakan.

c. Industri Pariwisata

Komponen wisata yang terakhir adalah industri pariwisata,

industri yang menyediakan berupa jasa, daya tarik dan juga sarana pariwisata. Komponen ini juga yang menjadi lahan bisnis bagi masyarakat setempat atau pengelola wisata dimana mereka bisa menjual hasil kerajinan yang menjadi ciri khas daerah tersebut, membuka biro perjalanan wisata dan lain sebagainya.

I Gusti Bagus Rai (2014) menjelaskan bahwa hal yang penting dalam suatu pengembangan daerah tujuan pariwisata adalah pengembangan pada produk pariwisatanya, seperti daya tarik wisata, fasilitas wisata, aksesibilitas dan adanya keterkaitan peran masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata. Dalam perencanaan, tentunya ada proses yang dilakukan secara sistematis dalam melaksanakan perencanaan tersebut. Supaya memudahkan dalam melaksanakan perencanaan tersebut.

a. Proses pelaksanaan pelaksanaan (Pihak Pemerintah)

Ada beberapa proses pelaksanaan perencanaan pengembangan daerah tujuan pariwisata oleh pemerintah baik pusat maupun daerah yaitu:

- 1) Proses pengajuan anggaran, mencakup: studi kelayakan terhadap ketersediaan dan kesiapan produk wisata dan daya dukung daerah pengembangan, penyusunan kerangka acuan kerja/TOR (sebagai dasar dan acuan pengajuan anggaran), penyusunan rencana anggaran biaya (sebagai dasar dan acuan pengajuan anggaran).
- 2) Proses persiapan pelaksanaan, mencakup: pembentukan panitia lelang/tender (POKJA), penyusunan kerangka acuan kerja sebagai bahan pengajuan lelang/tender di LPSE, penyusunan rencana

anggaran (RAB), penyusunan jadwal lelang/tender, evaluasi penyedia (POKJA), pengumuman pemenang lelang/tender, pembuatan kontrak pelaksanaan pekerjaan, penandatanganan kontrak pelaksanaan pekerjaan antara pemerintah/pihak kesatu (PPK) dengan penyedia pemenang/pihak kedua (direktur/direksi), pembuatan surat penunjukan kerja (SPK) oleh PPK.

b. Proses Pelaksanaan Perencanaan (Pihak Penyedia/Organisasi Non Pemerintah)

Proses perencanaan yang dilaksanakan oleh pihak penyedia/swasta yang memenangkan lelang atau yang ditunjuk pemerintah sebagai pelaksana perencanaan, tentunya berbeda proses pelaksanaan perencanaannya.

- 1) Proses persiapan pelaksanaan: membentuk tim tenaga ahli sesuai dengan permintaan yang tercantum dalam kerangka acuan kerja lelang, membentuk tim tenaga survei, dan mempersiapkan fasilitas dan kebutuhan dalam pelaksanaan perencanaan.
- 2) Perumusan tujuan dan sasaran, yakni untuk menentukan rencana atau pengembangan apa yang harus dibuat untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, sehingga pengembangan daerah tujuan pariwisata tersebut sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat lokal (setempat).
- 3) Survei, untuk mengetahui kondisi daerah/wilayah pengembangan dan untuk mendapatkan data dan informasi baik kualitatif maupun

kuantitatif yang mengenai kepariwisataan khususnya unsur-unsur yang terkait di dalam sistem daerah tujuan pariwisata (destinasi pariwisata) dan unsur-unsur pendukung lainnya yang ada di daerah/wilayah perencanaan tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi unsur-unsur tersebut.

- 4) Analisis data dan informasi dari hasil survei kemudian hasilnya disusun secara sintesis untuk menghasilkan suatu temuan yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana dan rekomendasi.
- 5) Rekomendasi, berdasarkan dari hasil analisis dan rumusan gagasan maka rekomendasi rencana pengembangan dapat disusun. Sebelum menjadi ketentuan yang paling tepat untuk diimplementasikan atau dilaksanakan terlebih dahulu rekomendasi tersebut harus dievaluasi dan dirumuskan dengan melibatkan berbagai elemen baik pemerintah, swasta dan masyarakat yang berkepentingan serta terkait dalam pengembangan daerah tujuan pariwisata.
- 6) Implementasi, proses mengimplementasikan dari hasil rekomendasi dengan dasar yang telah ditetapkan dalam rencana pengembangan yang telah disusun

Untuk mengetahui bentuk pariwisata Pandit (1994) menjelaskan bahwa bentuk-bentuk dari pariwisata dapat dibedakan berdasarkan maksud dan tujuan para wisatawan dalam mengunjungi suatu objek wisata<sup>23</sup>, bentuk-bentuk yang dimaksud, yaitu;

- a. Wisata Budaya, adalah suatu perjalanan yang dilakukan guna menambah wawasan kita tentang budaya di suatu daerah baik dalam negeri maupun di luar negeri. Seperti halnya mengunjungi situs-situs budaya, mempelajari adat istiadat dalam suatu masyarakat, kebiasaan hidup dari masyarakatnya dan juga budaya serta kesenian-kesenian mereka.
- b. Wisata Bahari, adalah suatu kegiatan wisata yang fokusnya lebih kepada perairan, dimana wisatawan bisa menikmati keindahan alamnya baik itu di laut, danau atau teluk. Wisatawan juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan olahraga seperti memancing, menyelam, selancar atau melakukan foto-foto di sekitar objek wisata yang dikunjungi.
- c. Wisata Cagar Alam, jenis wisata ini biasanya banyak dilakukan oleh para agen-agen perjalanan wisata yang memang secara khusus mengatur perjalanan para wisatawan menuju ke tempat-tempat atau daerah cagar alam, hutan-hutan lindung, hutan-hutan pegunungan dan objek lainnya yang masuk dalam perlindungan pemerintah. Wisata ini biasanya juga dilakukan oleh para ilmuwan-ilmuan guna melakukan sebuah penelitian, para pencinta flora dan fauna juga para wisatawan yang suka memotret.
- d. Wisata Konvensi, adalah sebuah wisata yang berbentuk bisnis dengan cara menyediakan ruangan atau fasilitas-fasilitas pendukung lainnya untuk sebuah acara-acara besar atau acara resmi semisal pernikahan, konser, rapat-rapat penting, konferensi, baik itu yang sifatnya nasional maupun internasional.

- e. Wisata Pertanian, adalah sebuah perjalanan wisata yang biasanya dilakukan di daerah-daerah perkebunan, sawah atau ladang dengan tujuan menikmati keindahan dari pada agrowisata dan ada juga yang dilakukan untuk keperluan-keperluan dalam pendidikan dan juga penelitian.
- f. Wisata Buru, adalah jenis wisata yang dilakukan bagi para wisatawan yang mempunyai hobi untuk berburu binatang di hutan, seperti babi hutan atau banteng. Dan biasanya tempat wisata ini sudah sengaja disediakan oleh pemerintah.
- g. Wisata Ziarah, jenis wisata yang satu ini biasanya dilakukan oleh kalangan masyarakat-masyarakat tertentu. Mereka percaya bahwasannya dengan melakukan ziarah, doa atau permintaan ke tempat-tempat suci dan juga makam-makam orang yang dihormati, apa yang mereka minta akan dikabulkan.

Sementara untuk mengetahui distinasi wisata Kusudianto dalam Pitana dan Diarta (2009), mereka menggolongkan sebuah destinasi wisata dalam empat golongan, diantaranya adalah:

- a. Destinasi sumber daya alam
- b. Destinasi wisata budaya
- c. Sarana atau fasilitas dari sebuah tempat rekreasi,
- d. Acara-acara atau event,
- e. Aktivitas spesifik, contohnya seperti wisata belanja, dan
- f. Daya tarik psikologis, seperti petualang

Menurut Pitana (2009) mendefinisikan destinasi sebagai berikut: “Destinasi adalah tempat yang dikunjungi dengan waktu yang signifikan selama perjalanan seseorang dibandingkan dengan tempat yang lain yang dilalui selama perjalanan (misalnya daerah transit).

Dalam penelitian ini, pengembangan destinasi pariwisata perlu dilihat dari 4 urusan kewenangan pemerintah Kalurahan Triharjo membangun relasi bersama pokdarwis, antara lain:

- a. Kewenangan penyelenggaraan pemerintah Desa/Kalurahan
- b. Kewenangan pelaksanaan pembangunan
- c. Kewenangan pembinaan kemasyarakatan
- d. Kewenangan pemberdayaan masyarakat

Bagaimana kemudian pemerintah berintegrasi bersama kelompok masyarakat Pokdarwis dalam pengembangan perairan peninggalan belanda menjadi destinasi wisata. Kewenangan penyelenggaran pemerintah bisa dilihat dari pembuatan regulasi Desa/Kalurahan (Perdes) tentang destinasi yang akan dikembangkan. Kewenangan pelaksanaan pembangunan bisa dilihat dari sarana pembangunan sarana prasarana seperti pengembangan arsitektur bangunan, tempat parkir, toilet umum, infrastruktur jalan, penginapan, kewenangan peminanan masyarakat bisa dilihat dari pengadaan pelatihan, bimtek tentang pengembangan destinasi wisata, sementara kewenangan pemberdayaan masyarakat bisa dilihat dari pengembangan UMKM masyarakat sebagai pelaku pengembangan destinasi pariwisata.

### 3. Institusi Lokal Masyarakat

Di dalam perkembangan pembangunan lembaga istilah lokal sulit didefinisikan. Pada tataran makro lokal adalah lawannya dari global. Sehingga istilah lokal dapat digunakan untuk menyebut peradaban suatu negara sedang global untuk menyebut peradaban pada tataran antarnegara (regional dan internasional).

Lokal menurut pemahaman Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah pada Tataran Mikro artinya istilah lokal untuk menyebut kawasan daerah tingkat satu/propinsi, daerah tingkat dua/kabupaten atau kota, dan dimungkinkan lokal untuk menyebut yang lebih spesifik yaitu kecamatan dan desa. Jadi institusi lokal merupakan asosiasi komunitas setempat yang bertanggung jawab atas proses kegiatan pembangunan setempat (Esman dan Uphoff, 1982:9), seperti rukun tetangga, arisan, kelompok pengajian, kelompok ronda dan sejenisnya. Yang jelas institusi ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah setempat.

Institusi lokal dalam komunitas harus dilihat sebagai suatu sistem yang saling silang menyilang (*cross-cutting affiliation*) dan institusi lokal telah menyediakan jaring pengaman sosial (*sosial safety net*) ketika komunitas lokal berada dalam situasi krisis. Kehadiran institusi lokal bukan atas kepentingan pribadi/individu tetapi atas kepentingan bersama, sehingga institusi lokal lama kelamaan menduduki pada posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal. Rasa saling percaya warga komunitas lokal yang digalang dan diasah melalui institusi ini semakin hari semakin didambakan sebagai modal sosial (*sosial capital*).



Institusi lokal ternyata mampu menjadi bingkai etika komunitas lokal (Purwo Santoso, 2002:6). Institusi lokal pada dasarnya adalah regulasi perilaku kolektif, di mana sandarannya adalah etika sosial, sehingga institusi lokal mampu menghasilkan kemampuan mengatur diri sendiri dari kacamata normatif.

Dalam penelitian ini, instusi lokal atau organisasi lokal masyarakat di Kalurahan Triharjo yaitu Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pokdarwis sendiri adalah lembaga yang berperan penting dalam pengembangan sektor pariwisata di daerahnya.

Di Kalurahan Triharjo Pokdarwis sebagai pelaku pengembangan destinasi wisata perairan peninggalan Belanda, pokdarwis berperan aktif dalam Kewenangan penyelenggaran pemerintah dari pembuatan regulasi Desa/Kalurahan (Perdes) tentang destinasi yang akan dikembangkan. Kewenangan pelaksanaan pembangunan dari sarana pembangunan sarana prasarana seperti pengembangan arsitektur bangunan, tempat parkir, toilet umum, infrastruktur jalan, penginapan, kewenangan pembinaan kemasyarakatan dari pengadaan pelatihan, bimtek tentang pengembangan destinasi wisata, serta kewenangan pemberdayaan masyarakat bisa dari pengembangan UMKM masyarakat sebagai pelaku pengembangan destinasi pariwisata. Di Kalurahan Triharjo pemerintah Kalurahan dan Pokdarwis sebagai pilar penting dalam pengembangan destinasi wisata.

Sementara itu Maksud dari pembentukan yaitu merupakan wujud untuk pengembangan kelompok masyarakat agar berperan sebagai

motivator, penggerak, serta komunikator dalam upaya meningkatkan kepedulian dan kesiapan masyarakat masyarakat di sekitar destinasi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata agar berperan sebagai rumah yang baik bagi berkembangnya kepariwisataan, serta memiliki kesadaran akan peluang dan nilai manfaat yang dapat dikembangkan dari kegiatan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pokdarwis termasuk dalam kelompok swadaya dan swakarsa yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan, meningkatkan peran dan partisipasi dalam pembangunan kepariwisataan, meningkatkan nilai manfaat kepariwisataan, dan mensukseskan pembangunan kepariwisataan (Wirajuna & Supriadi, 2017). Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) adalah suatu badan tingkat masyarakat yang keanggotaannya terdiri dari pemangku kepentingan industri pariwisata yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab dan bertindak sebagai promotor aktif untuk membantu menciptakan suasana yang memungkinkan untuk mendukung pertumbuhan, pengembangan dan pelaksanaan pariwisata serta terwujudnya septa pesona melalui pariwisata untuk mempromosikan pembangunan daerah dan manfaatnya bagi pelestarian alam (Firmansyah, 2012). Pokdarwis merupakan salah satu komponen dalam masyarakat yang memiliki peran dan kontribusi penting dalam pengembangan kepariwisataan di daerahnya.

#### 4. Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.<sup>7</sup> Pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari atas kepalakepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data dan informasi dan memberi pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil Kepala Desa di wilayahnya.

Pemerintah Desa memiliki peran signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan. Guna mewujudkan tugas tersebut, pemerintah desa dituntut untuk melakukan perubahan, baik dari segi kepemimpinan, kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas dan bermakna, sehingga pemerintah desa benar-benar makin mengarah pada praktek *Good local Governance*, bukannya *bad Governance*. Peluang untuk menciptakan pemerintahan desa yang berorientasi pada *Good local Governance* sebenarnya dalam konteks transisi demokrasi seperti yang dialami oleh bangsa Indonesia sekarang terbuka cukup lebar.

Hal ini setidaknya didukung oleh kondisi sosial pasca otoritarianisme Orde Baru yang melahirkan liberalisasi politik yang memungkinkan seluruh elemen masyarakat di desa secara bebas mengekspresikan gagasan-gagasan politiknya. yang syarat dengan menyeragaman dan pengekan sosial. Meskipun demikian, adanya perubahan sosial-politik dalam masa transisi demokrasi ini tidak dengan serta merta dapat merubah dalam sekejap wacana dan kinerja pemerintahan desa ke dalam visi demokratisasi dan *Good local Governance*.

Sekalipun strukturnya mengalami perubahan, dimana saat ini pemerintahan desa tidak lagi bercorak korporatis dan sentralistik pada kepemimpinan Kepala Desa, akan tetapi kultur dan tradisi paternalistik yang memposisikan Kepala Desa sebagai orang kuat dan berpengaruh masih begitu melekat dengan kuat. Realitas ini memang tidak dapat dilepaskan sebagai bagian dari proses kontruksi sosial yang begitu mendalam sehingga membuat daya kognitif warga desa seringkali terasa kesulitan dalam membuat terobosan-terobosan baru yang sejalan dengan semangat perubahan ketika berbenturan dengan kebijakan seorang Kepala Desa. Kondisi ini sedikit banyaknya juga dipengaruhi pula oleh lemahnya human resources di desa yang populasinya relatif kecil dan sangat terbatas. Sebab itu guna mendobrak kebekuan atau stagnasi sosial ini diperlukan terobosan dari kekuatan luar untuk bermitra atau saling bekerjasama dengan aktor-aktor dan lembaga-lembaga potensial di desa dalam melakukan perubahan sosial menuju ke arah situasi yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.

Untuk mengetahui relasi pemerintah desa, menurut Ruben dan Stewart (2013:286) dalam pengertian umum mengungkapkan bahwa hubungan interpersonal itu hubungan yang berdasarkan pada pengolahan pesan yang timbal-balik. Sebuah hubungan dibentuk ketika terjadinya pengolahan pesan yang timbal balik. Hubungan antar sesama dalam istilah sosiologi disebut relasi atau *relation*.

Relasi juga disebut sebagai hubungan sosial merupakan hasil dari interaksi (rangkaiannya tingkah laku) yang sistematis antara dua orang atau lebih. Relasi merupakan hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi. Suatu relasi atau hubungan akan ada jika tiap-tiap orang dapat meramalkan secara tepat macam tindakan yang akan datang dari pihak lain terhadap dirinya. Dikatakan sistematis karena terjadinya secara teratur dan berulang kali dengan pola yang sama.

Hubungan sosial atau relasi sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain, saling mempengaruhi dan didasarkan pada kesadaran untuk saling menolong, relasi sosial merupakan proses mempengaruhi di antara dua orang.

Apapun bentuk hubungan yang terjadi, dinamika sebuah hubungan interpersonal akan tumbuh, berkembang dan berakhir. Menurut Ruben (2006), tahap-tahap hubungan interpersonal akan meliputi:

- a. Inisiasi, merupakan tahap paling awal dari suatu hubungan interpersonal. Pada tahap ini individu memperoleh data mengenai

masing-masing melalui petunjuk nonverbal seperti senyuman, jabatan tangan, pandangan sekilas, dan gerakan tubuh tertentu.

- b. Eksplorasi, tahap ini merupakan pengembangan dari tahap inisiasi dan terjadi tidak lama sesudah inisiasi di sini mulai dijajaki potensi yang ada dari setiap individu serta dipelajari kemungkinan-kemungkinan yang ada dari suatu hubungan.
- c. Intensifikasi. Pada tahap ini individu harus memutuskan baik secara verbal maupun non verbal apakah hubungan akan dilanjutkan atau tidak.
- d. Formalisasi, dalam perkembangannya hubungan yang telah berjalan itu perlu diformalkan. Pada tahap ini tiap-tiap iindividu secara bersama mengembangkan simbol- simbol, pola-pola komunikasi yang disukai, kebiasaan dan lain sebagainya.
- e. Redefenisi, sejalan dengan waktu individu tidak dapat menghindarkan diri dari perubahan. Perubahan ini mampu menciptakan tekanan terhadap hubungan yang tengah berlangsung.
- f. Deteriorasi, kemunduran atau melemahnya suatu hubungan kadang tidak disadari oleh mereka yang terlibat dalam hubungan tersebut. Jika kemunduran yang terjadi itu tidak segera diantisipasi maka bukan tidak mungkin hubungan yang terbentuk itu akan mengalami kehancuran.

Dalam penelitian ini pemerintah Desa/Kalurahan Triharjo menjadi struktur penting dalam membangun relasi dengan Pokdarwis sebagai Institusi lokal masyarakat Triharjo berdasarkan urusan tugas fungsi dan wewenangnya. Pemerintah desa diharapkan mampu membangun sinergi

yang baik dengan Pokdarwis dalam pengembangan destinasi wisata di Kalurahan Triharjo.

Bagaimana melihat relasi kuasa pemerintah Kalurahan Triharjo dan Pokdarwis sebagai organisasi lokal masyarakat. Dalam pengembangan destinasi pariwisata relasi kuasa pemerintah dan pokdarwis perlu dilihat dari model, penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat. Dalam perspektif *governance* penelitian ini akan menganalisis relasi kuasa pemerintah kalurahan terhadap pokdarwis.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatif kualitatif, penelitian dengan metode eksplanatif yaitu penelitian yang tujuan penelitian eksplanatif adalah untuk memberikan penjelasan mengapa sesuatu terjadi atau menjawab pertanyaan “mengapa (*why*)”. Sarwono (2006:193) menjelaskan penelitian kualitatif sebagai proses, pemahaman, kompleksitas, interaksi dan manusia.

Secara umum, penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, aktivitas sosial, dan lain-lain. Penggunaan pendekatan kualitatif membantu peneliti menemukan dan memahami apa yang terjadi di belakang sebuah fenomena. Hal ini memerlukan pemahaman dan pemaknaan yang baik dari peneliti sebab hasilnya adalah sesuatu yang tidak bulat dan tidak pasti. Penelitian kualitatif

cenderung kontekstual dan umumnya mempelajari suatu fenomena secara induktif, yaitu berangkat dari hal-hal yang spesifik (khusus) kemudian menuju ke hal-hal umum untuk memahami makna (Tracy, 2013, p. 22).

Sementara itu, sifat penelitian ini adalah eksplanatif. Studi eksplanatif bertujuan untuk menjelaskan informasi deskriptif. Artinya, pertanyaan yang diajukan kepada informan merupakan pertanyaan ‘mengapa’ dan ‘bagaimana’ (Gray dalam Boru, 2018, p. 2). Dengan begitu, dapat pula teridentifikasi alasan suatu fenomena terjadi. Sifat penelitian eksplanatif berusaha mencari penyebab dan alasan, serta memberikan bukti untuk mendukung atau menyangkal penjelasan atau prediksi. Hal ini dilakukan untuk menemukan beberapa hubungan antara berbagai aspek fenomena yang diteliti (Boru, 2018, p. 2).

## **2. Objek Penelitian**

Menurut Spradley (dalam Sugiyono, 2017: 229), objek penelitian dalam penelitian kualitatif terdiri atas tiga komponen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activities*). Berdasarkan pemahaman tersebut, maka objek penelitian ini, yaitu: *Pertama*, tempat (*place*) adalah Kalurahan Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kedua*, pelaku (*actor*) adalah organisasi Pokdarwis dan pemerintah Kalurahan. *Ketiga*, aktivitas (*activities*) adalah pengembangan destinasi wisata perairan peninggalan Belanda. Jadi, objek penelitian ini Relasi Pokdarwis bebersama Pemerintah Desa dalam “Pengembangan



Destnasi Wisata Perairan Peninggalan Belanda”, di Desa Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

### **3. Subyek Penelitian**

Subjek penelitian adalah informan dalam penelitian ini. Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pengambilan informan yang didasarkan atas tujuan tertentu yaitu mampu memberikan data atau informasi yang sesuai dengan topik penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan informan yang didasarkan atas tujuan tertentu yaitu mampu memberikan data atau informasi yang sesuai dengan topik penelitian.

Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang terdiri dari:

- a. Lurah Kalurahan Triharjo;
- b. Carik Kalurahan Triharjo;
- c. Pokdarwis Kalaruhan Triharjo
- d. Ketua BPKal Triharjo; dan
- e. masyarakat (5 orang)

### **4. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini akan dilaksanakan selama dua bulan terhitung sejak Juli – September 2023. Dengan saya memilih lokasi di Kalurahan tersebut karena di Kalurahan

Triharjo merupakan kalurahan yang memiliki daya tarik potensi alam yang mesti dikembangkan, yang dimana sebenarnya dengan adanya potensi yang dimiliki kalurahan guna dapat meningkatkan perkembangan kalurahan serta kemandirian masyarakat demi tercapainya kesejahteraan.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Observasi**

Peneliti mengembangkan pengamatan berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan (Bungin, 2007:115). Dalam penelitian ini, peneliti mengamati keadaan wilayah serta dinamika Pokdarwis, bersama pemerintah Kalurahan, program-program pengembangan destinasi wisata perairan peninggalan Belanda, dan juga pengorganisasian yang meliputi konsep pengembangan jangka panjang, dan hal-hal teknis seperti penyediaan sarana prasarana penunjang di Kalurahan Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **b. Wawancara**

Penelitian ini mengkombinasikan dua jenis wawancara yaitu wawancara terarah dan wawancara mendalam (*indepth interview*). Berkaitan dengan wawancara terarah, peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya (panduan wawancara). Sementara itu, wawancara mendalam dilakukan dengan

cara bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan (Raharjo, 2011: 2). Dalam penelitian ini diharapkan untuk mendapatkan informasi tentang relasi pemerintah Kalurahan dan Pokdarwis sebagai organisasi lokal dalam pengembangan destinasi wisata perairan peninggalan Belanda.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017:476), dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi merujuk pada fakta yang tersimpan dalam profil Kalurahan Triharjo dan profil Pokdarwis.

## **6. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992: 16-20) tentang interaktif model. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dicatat dalam catatan lapangan kemudian dideskripsi dan direfleksi.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan

polanya. Reduksi data bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan dan mencari data selanjutnya bila diperlukan.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan hasil reduksi yang disajikan dalam laporan secara sistematis yang mudah dibaca atau dipahami baik sebagai keseluruhan maupun bagian-bagiannya dalam konteks sebagai satu kesatuan.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan sesuai dengan data-data yang diperoleh dalam penelitian dan telah dianalisis. Dalam hal ini, kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian.

## **BAB II**

### **DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

#### **A. Keadaan Geografis**

##### **1. Sejarah Kalurahan**

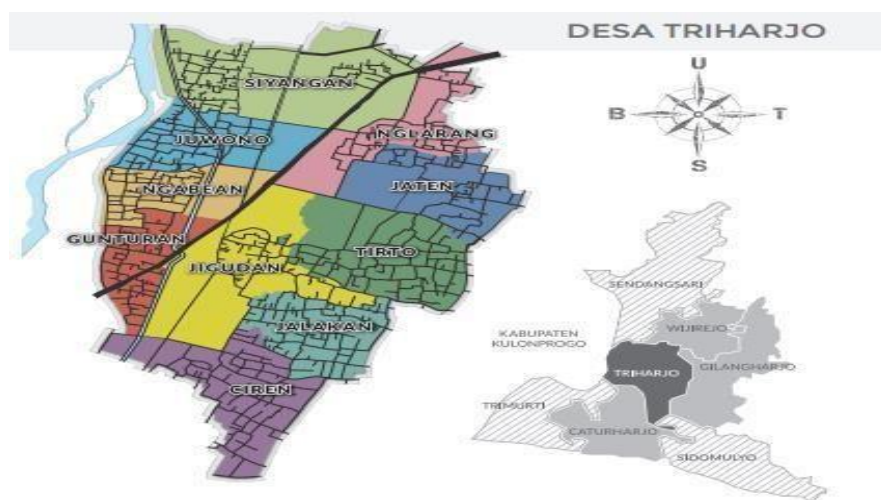
Sejak Negara Republik Indonesia berdiri dan Kraton Ngayogyakarta menyatakan “bergabung” maka dilakukan beberapa perubahan dalam sistem pemerintahan di wilayah Negeri Ngayogyakarta, termasuk Kalurahan Siyangan, Kalurahan Gunturan dan Kalurahan Tirto dikukuhkan dengan menyesuaikan peraturan dan pedoman Negeri Ngayogyakarta, baik dalam Tata Kaprajaan (Pemerintahan) dan hukum-hukum adat yang sudah mengakar di masyarakat Yogyakarta. Beberapa Punggowo Projo, Lurah dan Pamong Projo yang selalu melakukan pertemuan-pertemuan di Kapanewon Pandak (Kecamatan Pandak) memiliki kesepakatan untuk bergabung dari Kalurahan Siyangan, Kalurahan Gunturan dan Kalurahan Tirto melebur bergabung menjadi satu kelurahan yang diberi nama “TRIHARJO” pada tanggal 30 Oktober 1946.

Triharjo berasal dari kata Tri yang artinya tiga dan Harjo sebuah penggalan kalimat Raharjo yang mempunyai arti sejahtera. Sejahtera yang dimaksud adalah kecukupan pada tiga hal yang menjadi kebutuhan dasar orang hidup, yaitu kecukupan pangan, kecukupan sandang dan kecukupan papan atau tempat tinggal. Triharjo juga memiliki makna /arti yang menggambarkan bersatunya 3 kalurahan dan melebur bergabung menjadi satu.

## 2. Kondisi Geografis

Secara Geografis, Desa Triharjo terletak diantara  $110^{\circ} 16' 13''$  sampai  $110^{\circ} 17' 39''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ} 54' 27''$  sampai  $7^{\circ} 54' 46''$  Lintang Selatan. Secara Administratif Desa Triharjo merupakan bagian dari 75 desa yang berada di Kabupaten Bantul, dan merupakan salah satu dari 4 (empat) desa di Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya berada di  $\pm 10$  Km arah Barat Daya dari pusat kota Bantul.

**Gambar 2. 1**  
**Peta Desa Triharjo**



## 3. Batas wilayah

Adapun letak dan batas wilayah Kalurahan Triharjo adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Desa Wijirejo, Desa Sendangsari
- Sebelah Selatan: Desa Caturharjo, Desa Trimuri
- Sebelah Timur: Desa Gilangharjo, Desa Sidomulyo
- Sebelah Barat: Sungai Progo (Batas Kabupaten Bantul dan Kulon Progo)

## B. Keadaan Demografi

### 1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data penduduk Tahun 2020 jumlah penduduk Desa Triharjo sebanyak 12.709 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 6.362 jiwa Penduduk perempuan 6.347 jiwa

**Tabel 2. 1**

**Jumlah Penduduk 2022-2023**

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	Jumlah penduduk laki-laki	6.362	orang
	Jumlah penduduk perempuan	6.347	orang
	Jumlah keluarga	4.336	KK
2	Penduduk golongan umur		
	0-5 tahun (balita)	858	orang
	6-15 tahun (usia sekolah)	1.796	orang
	16-65 tahun (usia produktif)	6.465	orang
	66 tahun keatas (lansia)	2.192	orang

*Sumber: Profil Kalurahan Triharjo 2023.*

Berdasarkan tabel di atas mengenai rincisn uraian sumber daya manusia, jumlah penduduk di Desa Triharjo didominasi oleh laki-laki dengan jumlah 6.362 orang sedangkan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 6.347 orang, keduanya memiliki selisih yang tidak terlalu jauh, sementara dalam kepala keluarga di desa triharjo berjumlah 4.336 kepala keluarga, dari golongan umur dimulai dari usia 0-5 tahun (belita) berjumlah 858 orang, dari usia 6-15 tahun (usia sekolah) berjumlah 1.796 orang, usia 16-65 tahun (usia produktif) berjumlah 6.465 orang sementara dari usia 66 tahun keatas (lansia) berjumlah 2.192 orang.

Berdasarkan data di atas Desa Triharjo memiliki jumlah usia produktif yang paling banyak usia cukup matang, hal ini sejalan dengan penelitian ini jumlah usia produktif tersebut menjadi subyek untuk jadikan sumber informasi dan diharapkan dapat memberikan jawaban yang logis, kritis, serta masukan-masukan berkaitan dengan relasi pemerintah kalurahan dan institusi lokal masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata.

### **C. Kondisi Sosial dan Ekonomi**

Adapun Potensi pertumbuhan ekonomi Desa Triharjo terletak pada jalur utama Jalan Srandakan-Bantul, selain itu juga pada jalur sekunder di Desa Triharjo yaitu melewati pedukuhan Jaten dan Tirto. Pemanfaatan lahan yang tumbuh sepanjang poros/jalur utama jalan Jalan Srandakan-Bantul didominasi oleh lahan pertanian. Beberapa kantor pemerintahan, perdagangan, dan jasa berada pada lapis pertama pada poros utama jalan.

Komposisi lapis kedua didominasi oleh lahan pertanian saluran irigasi, dan jalan menuju lapis ketiga. Pada lapis kedua memiliki capaian aksesibilitas yang lebih mudah, kualitas lingkungan yang lebih baik dan berada pada kontur tanah yang relatif datar.

Komposisi lapis ketiga didominasi oleh permukiman warga penduduk. Permukiman wilayah barat Desa Triharjo memiliki kontur tanah yang datar dan berbatasan dengan sungai progo. Sedangkan kondisi permukiman lapis ketiga di wilayah timur Desa Triharjo kontur tanah cenderung berbukit, labil,



dan liat sehingga mempengaruhi kualitas lingkungan dan kondisi sosial ekonomi. Permasalahan lingkungan yang mudah dijumpai seperti masalah akses ketersediaan air bersih, konstruksi bangunan yang mudah rusak aksesibilitas jalan yang masih sulit dijangkau sangat mempengaruhi pola hidup dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

Adapun klasifikasi potensi sumberdaya manusia dari kondisi ekonomi di Kalurahan Triharjo dapat dilihat dari:

### **1. Sumber Utama Penghasilan Penduduk**

Sumber utama penghasilan penduduk seperti pertanian, perikanan, perkebunan sebanyak 1.711 orang, pertambangan, dan penggalian sebanyak 271 orang, industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dan lain-lain) sebanyak 106 orang, perdagangan atau wirasasta sebanyak 349 orang, pertukangan sebanyak 211 orang, buruh sebanyak 1.528 orang, PNS sebanyak 166 orang, karyawan swasta sebanyak 538 orang, TNI/POLRI sebanyak 74 orang, pensiunan sebanyak 110 orang, angkutan pergudangan, komunikasi sebanyak 77 orang, jasa sebanyak 118 orang, lainnya sebanyak 314 orang, pengangguran/tidak bekerja sebanyak 1.600 orang.

### **2. Tenaga Kerja Berdasarkan Latar Pendidikan**

Tenaga kerja berdasarkan latar pendidikan seperti tidak tamat SD/tidak sekolah sebanyak 2.130 orang, lulusan SD sebanyak 5.089 orang, lulusan SMP sebanyak 2.679 orang, lulusan SMA sebanyak 3.187 orang, D-1 sebanyak 19 orang, D-2 sebanyak 3 orang, D-3 sebanyak 45 orang, lulusan S-1 ke atas sebanyak 348 orang.

Adapun klasifikasi potensi sumberdaya manusia dari kondisi sosial di Kalurahan Triharjo dapat dilihat dari gotong royong sebanyak 50 kelompok, adat istiadat sebanyak 39 kelompok, kesenian jatilan/Reog sebanyak 10 kelompok, jami'yah/pengajian dan lain-lain sebanyak 61 kelompok, peringatan hari besar nasional sebanyak 108 kelompok, peringatan hari besar agama sebanyak 112 kelompok peringatan hari besar adat budaya sebanyak 98 kelompok, kelompok tani sebanyak 58 kelompok, kerawitan sebanyak 6 kelompok, kesenian agama sebanyak 13 kelompok KWT sebanyak 11 kelompok, wayang kulit sebanyak 2 kelompok.

#### **D. Sarana dan Prasarana**

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat mendukung dalam mewujudkan kemandirian masyarakat desa di Kalurahan Triharjo dan perkembangan pembangunan yang berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

Pengelolaan sarana dan prasana merupakan tahap keberlanjutan yang dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam

rangka meningkatkan kesejahteraannya Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

- a. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan.
- b. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.
- c. Kompetensi pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.
- d. Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

Adapun klasifikasi potensi dari kondisi sarana dan prasarana di Kalurahan Triharjo dapat dilihat dari:

#### **1. Prasarana Umum**

Prasarana umum di Kalurahan Triharjo bisa dilihat seperti jalan sepanjang 75.900 meter, jembatan sebanyak 48 unit, irigasi sepanjang 21.225 meter, masjid sebanyak unit 19 unit, mushola sebanyak 29 unit,

gereja sebanyak 2 unit, gedung serba guna 11 unit, pos ronda sebanyak 46 unit, sarana olahraga sebanyak 33 unit, ruang terbuka umum sebanyak 13 unit, lapangan bulu tangkis sebanyak 10 unit, ipal komunal sebanyak 10 unit.

## **2. Prasarana Pendidikan**

Prasarana pendidikan di Kalurahan Triharjo bisa dilihat seperti TPA (Taman Penitipan Anak) sebanyak 1 unit, paud/KB sebanyak 12 unit, TK sebanyak 8 unit, SD sebanyak 6 unit, taman pendidikan alquran 27 unit, perpustakaan dusun sebanyak 6 unit, bahasa jepang sebanyak 1 unit.

## **3. Prasarana Kesehatan**

Prasarana kesehatan di Kalurahan Triharjo bisa dilihat seperti posyandu balita sebanyak 11 unit, posyandu lansia sebanyak 12 unit, poskesdes sebanyak 1 unit, bidan sebanyak 5 orang, PKLB sebanyak 1 unit, kader PPKBD sebanyak 22 orang, kader SUB PPKBD sebanyak 63 orang, kader yandu sebanyak 163 orang, kader jumantik sebanyak 126 orang, kader motivator KP ibu sebanyak 25 orang, dokter sebanyak 6 orang, klinik sebanyak 4 unit, air bersih/PAB sebanyak 5 unit, posbindu sebanyak 23 unit, perawat sebanyak 18 orang, kader BKB sebanyak 5 orang.

## **4. Usaha Ekonomi Produktif/ Industri Rumah Tangga**

Prasarana usaha ekonomi produktif di Kalurahan Triharjo bisa dilihat seperti warung sebanyak 112 unit, toko sebanyak 63 unit, pengrajin batik sebanyak 37 orang, pengrajin bambu sebanyak 17 orang, pengrajin pot bunga sebanyak 202 orang, pengrajin sapu sebanyak 1 orang, pengrajin sangkar burung 2 orang, pengrajin cengkronng sebanyak 1 orang,

pengelola sampah sebanyak 3 orang, penjahit sebanyak 4 orang, pedagang bambu sebanyak 4 orang, pedagang pakian sebanyak 7 orang, foto copy sebanyak 2 orang, sworoom batik sebanyak 17 unit, sablon sebanyak 100 orang, usaha las sebanyak 38 orang, mebel sebanyak 39 orang, panel surya sebanyak 38 orang, batu nisan sebanyak 10 orang, perikanan sebanyak 84 orang, peternak ayam potong sebanyak 2 orang.

Bengkel motor sebanyak 4 orang, bengkel mobil sebanyak 4 orang, olahan makanan sebanyak 79 orang, pengrajin emping malinjo sebanyak 63 orang, ingkung dan kripi lele sebanyak 2 orang, kue sakura sebanyak 2 orang, peyek sebanyak 2 orang, sagon sebanyak 4 orang, geplak sebanyak 4 orang, dodol sebanyak 1 orang, peternak gemak dan telur sebanyak 10 orang, wingko sebanyak 4 orang, bakpia sebanyak 3 orang, angkringan sebanyak 26 orang, bandeng sebanyak 1 orang, roti basah sebanyak 3 orang, jajanan pasar sebanyak 2 orang, cektring sebanyak 5 orang, pemanfaat toga (jamu) sebanyak 1 orang. Pengrajin tempe 3 orang, penjual buah sebanyak 2 orang.

## **5. Jaringan Listrik**

Prasarana jaringan listrik di Kalurahan Triharjo bisa dilihat seperti jumlahh KK sebanyak 4.334 kk, jumlah rumah sebanyak 3.346 unit, jumlah rumah sudah terlayani listrik sebanyak 3.275 unit, jumlah rumah belum terlayani listrik 145 unit.

## **6. Ketersediaan Air Bersih**

Prasarana ketersediaan air bersih di Kalurahan Triharjo bisa dilihat seperti jumlah KK sebanyak 4.334 kk, jumlah rumah sebanyak 3.346

rumah, sumur gali sebanyak 2.725 unit, sumur gali rawan kekeringan sebanyak 512 unit, sumur bor sebanyak 36 unit, spamdes/pamismas sebanyak 532 unit, tidak punya air bersih sebanyak 21 unit.

## **7. Sanitasi**

Prasarana sanitasi di Kalurahan Triharjo bisa dilihat seperti jumlah KK sebanyak 4.334 kk, jumlah rumah sebanyak 3.341 rumah, WC standar sebanyak 2.344 unit, WC cemplung sebanyak 64 unit, belum punya WC 207 unit.

## **8. Persampahan**

Prasarana persampahan di Kalurahan Triharjo bisa dilihat seperti jumlah KK sebanyak 4.011 kk, jumlah rumah sebanyak 3.085 rumah, sembarangan sebanyak 956 unit, disekitar rumah sebanyak 903 unit, dibakar/ ditimbun sebanyak 1.480 unit. Pengolahan/ pemilihan sampah sebanyak 2 unit.

## **E. Kondisi Pemerintahan Kelurahan**

### **1. Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan**

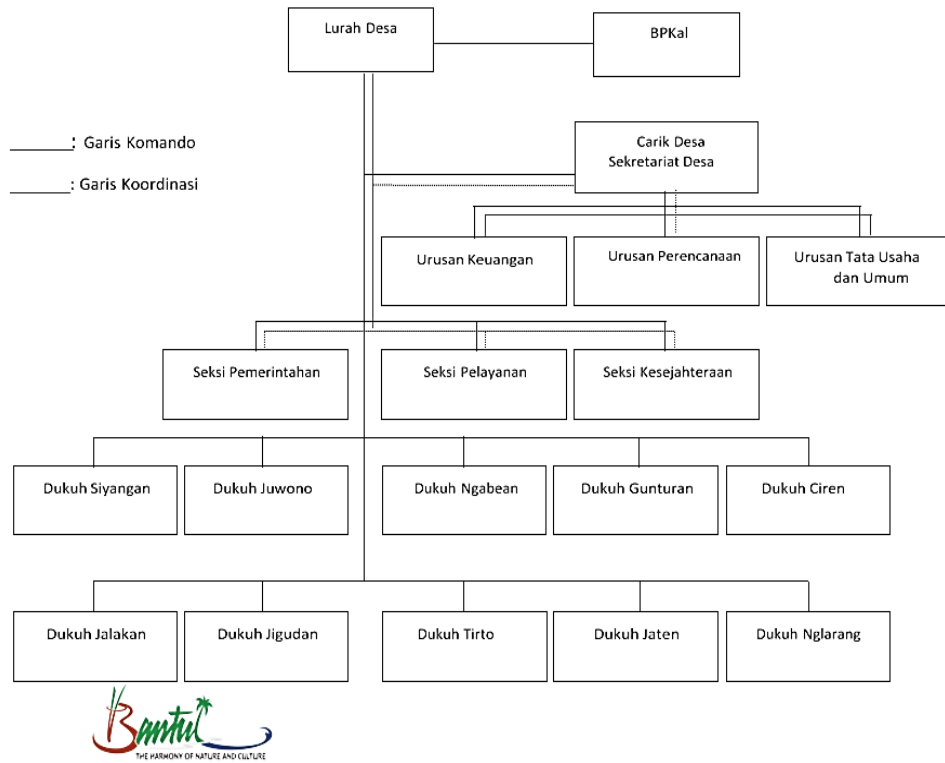
Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan ketugasan masing-masing lembaga. Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri dari Lurah Desa dan Pamong Desa yang unsurnya terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana

Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan. Sekretariat Desa bertugas membantu Lurah Desa dalam bidang administratif pemerintah desa yang dipimpin oleh Carik Desa dan 3 urusan, yaitu Urusan Keuangan, Urusan Perencanaan, Urusan Tata Usaha dan umum. Pelaksana Teknis terdiri dari 3 seksi, yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Pelayanan dan Seksi Kesejahteraan. Sedangkan pelaksana kewilayahan terdiri dari 10 dukuh sesuai dengan wilayah pedudukannya yaitu, Dukuh Siyangan, Dukuh Juwono, Dukuh Ngabean, Dukuh Gunturan, Dukuh Ciren, Dukuh Jalakan, Dukuh Jigudan, Dukuh Tirto, Dukuh Jaten, dan Dukuh Nglarang.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan desa bersama pemerintah desa, antara lain menjalankan fungsi membahas dan menyepakati peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja lurah desa. Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan setara dengan lurah desa yang keanggotannya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Anggota.

**Gambar 2. 2**

**Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Triharjo**



**2. Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan**

**Tabel 2. 2**

**Organisasi Kamasyarakatan Kalurahan**

No	Uraian Sumber Daya Kelembagaan/Organisasi	Volume	Satuan
1.	LPMD	1	Lembaga
2.	PKK	1	Lembaga
3.	Karang Taruna	1	Lembaga
4.	Rukun Tetangga (RT)	63	Lembaga
5.	SATLINMAS	1	Lembaga
6.	POKGIAT LPMD	10	Lembaga
7.	GAPOKTAN	1	Lembaga
8.	Kelompok Tani	10	Kelompok

Sumber: Profil Kalurahan Triharjo 2023



### **3. Visi dan Misi Kalurahan Triharjo**

#### **a. Visi**

“Terwujudnya Masyarakat Kalurahan Triharjo Yang Makmur, Sejahtera, Produktif, Unggul, Tenram Dan Agamis Berdasarkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan Kebangsaan Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

#### **b. Misi**

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- 2) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat, pengentasan kemiskinan dan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi warga masyarakat kalurahan Triharjo.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, trampil, kreatif, inovatif, beretika dan berkepribadian luhur.
- 4) Mewujudkan masyarakat Kalurahan yang memiliki keunggulan dalam budaya, seni, olahraga, dan ilmu teknologi.
- 5) Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana.
- 6) Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Desa Triharjo yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

#### 4. Organasi Pokdarwis Kalurahan Triharjo

Tabel 2. 3

##### Struktur Pengurus Pokdarwis

No	Nama	Jabatan
1.	Danang Wijanarko	Ketua
2.	Daniel Prasteyo	Wakil Ketua I
3.	Gayar Prakoso	Wakil Ketua II
4.	Sela Silvia	Sekretaris I
6.	Desinta Utami	Sekretari II
7.	Puji Maryono	Bendahara I
8.	Hangesti Kumaningrum	Bendahara II

## DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan M. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Pembangunan Kawasan Unggulan Minat Khusus Petualangan Kalimantan Timur. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengembangan Produk Pariwisata. 2001
- Eko, Sutoro. 2015. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: FPPD ACCESS.
- Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Andi: Yogyakarta
- Ife, Jim. 2008. *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practise*. Melbourne: Longman.
- I Gusti Bagus Rai. 2014. *Pemasaran Pariwisata*. Andi: Yogyakarta
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, L. J., 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Purwo Santoso, 2002. *Etika Sosial Institusi Lokal*. Universitas Airlangga.
- Sedarmayanti, 2003. *Dasar-dasar Pengetahuan Tentang Kepemerintahan*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfa Beta
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-dasar Pariwisata*. Andi: Yogyakarta

### Jurnal dan Artikel

- Armela Shintani 2020, *Relasi Pemerintah Daerah Dan Swasta Dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Di Kelurahan Sei Gohong, Administrasi Pemerintahan Daerah*. Tunggal Mandiri, Malang. ISBN 978-602-8878-24
- Governabilitas: Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta Volume 2, Nomor 1, Juni 2021.
- Hary Hermawan. September 2016. *Dampak Pengembangan Desaa Wisata Ngalenggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal*, Jurnal Pariwisata, Vol. III No. 2

- Muhammad Rozzaq Rofiq, Rebecha Prananta. Januari 2021. *Jenis-Jenis Objek Ekowisata Dan Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Nglanggeran Dalam Pengelolaan Ekowisata Di Desa Wisata Nglanggeran Kabupaten Gunungkidul*, Volume 5, Nomor 1, Journal of Tourism and Creativity P-ISSN: 2549-483X E-ISSN: 2716-5159.
- Musmulyadi, 2021 Analisis Governabilitas Peran Pemerintah Desa Girikarto Kapanewon Panggang Dalam Pengembangan Obyek Wisata Heha Ocean View
- Neneng Komariah & Encang Saepudin & Pawit M. Yusup. 2018. Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal, Volume 03 No 2, p 158-174 Print ISSN: 1410-7252.
- Nuryah Asri Sjafirah, Dian Wardiana Sjuhro, dan Heru Ryanto Budiana 2020, *Sinergi Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Suntenjaya Sebagai Community Based Tourism*, Volume 8, Nomor 1, Journal of Tourism and Creativity P-ISSN: 2549-483X E-ISSN: 2716-5159.
- Parasia 2017, *Pengembangan Pariwisata Dan Keterlibatan Masyarakat Di Desa Wisata Jatiluwih*, Universitas Islam Negeri, Jurnal Al-Bayan Volume 15, Nomor 21, 2017.
- Peters, B. G., & Pierre, J. 1998. "Governance without Government? Rethinking Public Administration", Journal of Public Administration Research and Theory, Vol.8, No.2:223-243.
- Raharjo, Mudjia. *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*. Malang: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana, 2011.
- Sari, Rosnida. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Pariwisata*. Aceh: Universitas Islam Negeri, Jurnal Al-Bayan Volume 22, Nomor 34, 2016.
- Ul Hakim Paxi Permadi dan Emy Kholifah R 2021, *Sinergitas Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Desa Wisata*, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 9 Issue 2 2020 ISSN 2089-6123; e-ISSN 2684-9119

#### **Internet**

[https://jogja.tribunnews.com/2022/03/19/pendapatan-dari-sektor-pariwisata-di-bantul-tembus-rp-6-miliar-dalam-waktu-25-bulan.di/diakses\\_pada\\_tanggal\\_29\\_Juni\\_2023,\\_pukul\\_16:30\\_Wib](https://jogja.tribunnews.com/2022/03/19/pendapatan-dari-sektor-pariwisata-di-bantul-tembus-rp-6-miliar-dalam-waktu-25-bulan.di/diakses_pada_tanggal_29_Juni_2023,_pukul_16:30_Wib)

**Sumber Lain**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang  
Kepariwisataaan